

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan terhadap *good governance* pada organisasi sektor publik saat ini semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pada sistem pemerintahan di Indonesia masih terdapat kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance*, namun penerapan *good governance* itu sendiri bukan berarti tidak bisa diciptakan. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan iklim pemerintahan yang baik.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penerapan *good governance* dapat memaksimalkan pencegahan tindakan korupsi baik secara politik maupun administrasi. Penciptaan *legal and political framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha serta terealisasinya disiplin anggaran menjadi tujuan dari adanya tata kelola pemerintahan yang baik pada suatu organisasi. Beberapa aspek yang mendukung terciptanya *good governance* salah satunya adalah pemeriksaan (audit).

Audit pada suatu organisasi dilakukan agar pengendalian organisasi dapat berjalan dengan efektif. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang dilakukan secara obyektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen. Pemeriksaan pada organisasi sektor publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen untuk memeriksa hasil kinerja pemerintah apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Pengungkapan kecurangan-kecurangan pada organisasi sektor publik dapat diungkapkan auditor apabila audit yang dihasilkan berkualitas. Audit yang berkualitas juga sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

Kegiatan pemeriksaan pada sektor publik merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan pengaruh besar terhadap kegiatan daerah. Salah satu bagian yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan non keuangan pemerintah adalah auditor pada Inspektorat, hal ini sesuai dengan pernyataan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah harus dapat melakukan pemeriksaan serta pengawasan dengan menjunjung tinggi akuntabilitas dalam memberikan hasil audit yang berkualitas untuk dapat meyakinkan pemerintah, DPRD, dan BPK serta merupakan sumber informasi penting bagi BPK sebagai

auditor eksternal. Pemeriksaan yang dilakukan inspektorat terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya di mana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas inspektorat adalah bagaimana meningkatkan sikap atau perilaku kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mengungkapkan bahwa posisi inspektorat di organisasi pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga kementerian dinilai tidak efektif (Kompas, 21 Agustus 2017).

Pengawasan inspektorat yang tidak efektif dapat menyebabkan kasus korupsi pada organisasi sektor publik. Salah satu kasus korupsi tersebut adalah kasus APBD yang terjadi di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pemerintahan Kabupaten Klungkung selalu mendapatkan opini audit Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari hasil audit BPK RI pada lima tahun terakhir, namun masih terjadi penyelewengan wewenang yang melibatkan mantan pejabat dan pejabat pemerintah yang masih aktif menjadi tersangka oleh hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Klungkung. Beberapa kasus kecurangan yang pernah terjadi di pemerintahan Kabupaten Klungkung antara lain kasus yang melibatkan mantan Bupati Klungkung dalam dugaan korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa senilai Rp. 17 miliar, kasus korupsi dana Koni oleh mantan Sekda di Kabupaten Klungkung senilai Rp. 1,8 miliar, dan dugaan kasus korupsi proyek Instalasi Biogas di Kecamatan Nusa Penida yang merugikan negara sebesar Rp. 792 juta

oleh anggota aktif DPRD Klungkung. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, opini yang baik seperti WTP dan WDP yang diberikan oleh BPK RI belum tentu menunjukkan pemerintah tersebut bebas dari korupsi.

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga biasanya mendapatkan opini audit yang baik atas kinerja yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, diketahui bahwa perkembangan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan opini audit yang didapat pada tahun tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun banyak kesalahpahaman mengenai opini audit yang diberikan oleh BPK RI seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Klungkung. Penting sekali bagi auditor Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih memaksimalkan pengawasan sebelum dilakukan audit eksternal oleh BPK RI agar opini audit yang diberikan mencerminkan keadaan pemerintah yang sesungguhnya dan dapat mengurangi kecurangan yang terjadi di pemerintahan. Salah satu cara dalam memaksimalkan pengawasan yang efektif adalah dengan meningkatkan kualitas audit pada organisasi sektor publik.

Hasil audit yang berkualitas merupakan tujuan yang harus dicapai oleh APIP. Kualitas audit adalah kemungkinan (probabilitas) seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem

akuntansi kliennya. Kualitas Audit sangat dipengaruhi oleh kesesuaian hasil pemeriksaan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kesesuaian tersebut harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan yang terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan, beserta standar tindak lanjut audit kinerja. Hasil pemeriksaan dapat dikatakan berkualitas apabila hasil telah sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan untuk menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi sebagai seorang auditor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit di antaranya adalah Pengalaman Kerja, Kompetensi, Tekanan Anggaran Waktu, dan *Moral Reasoning*.

Pengalaman kerja merupakan suatu cara pembelajaran yang baik bagi auditor agar lebih menguasai teknik audit. Auditor yang berpengalaman memiliki pengetahuan struktur memori yang baik mengenai audit dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Pengalaman kerja juga akan membentuk auditor yang mampu menghadapi hambatan dan berbagai persoalan terkait audit yang dilakukannya. Semakin berpengalaman seorang auditor, maka keputusan yang diambil akan semakin dapat dipertanggungjawabkan serta akan dapat menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah kompetensi. Menurut Imansari, *et. al.* (2016), kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, dan pada saat melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Perbedaan pengetahuan atau keterampilan yang dikuasai seorang auditor akan berpengaruh

pada cara auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dalam menghasilkan audit yang berkualitas dibutuhkan seorang auditor yang kompeten.

Tekanan anggaran waktu juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun. Tuntutan laporan audit yang berkualitas dengan waktu yang dibatasi dapat menjadi suatu tekanan tersendiri bagi auditor. Auditor menjadi terlalu percaya kepada penjelasan klien dan gagal dalam menemukan kecurangan sehingga menghasilkan hasil audit yang berkualitas rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit.

Moral reasoning juga menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi kualitas audit. *Moral reasoning* (penalaran moral) mengacu pada proses penalaran di mana perilaku, intitusi, atau kebijakan dinilai sesuai atau melanggar moral. Penalaran moral dapat mendasari seorang auditor dalam melakukan tindakan apakah keputusan itu benar atau salah saat melaksanakan audit, sehingga dengan adanya penalaran moral, maka hasil audit dilaporkan dengan sebenar-benarnya dan bebas dari kecurangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit tersebut. Penelitian mengenai kualitas audit yang telah ada diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Naibaho, *et. al.* (2014), yaitu meneliti pengaruh independensi, kompetensi, *moral reasoning* dan skeptisisme profesional auditor pemerintah terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan di BPK RI perwakilan provinsi Riau.

Marbun (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, pengalaman kerja, dan komitmen organisasi terhadap kualitas audit yang dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. Sedangkan Shintya, *et. al.* (2016), meneliti pengaruh kompetensi, independensi, dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit yang dihasilkan pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis bermaksud menguji kembali pengaruh variabel-variabel tersebut pada tahun, objek, dan metode statistik yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian dilakukan di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan metode statistik yang digunakan adalah pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* SmartPLS, di mana pada penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis data *Statistical Package for Social Science* (SPSS) sebagai metode statistik dalam penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan judul **“Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, Tekanan Anggaran Waktu, dan *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *moral reasoning* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menguji 4 (empat) variabel independen yang terdiri dari Kompetensi, Pengalaman Kerja, Tekanan Anggaran Waktu, dan *Moral Reasoning*, dengan objek penelitiannya yaitu Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk menganalisis apakah *moral reasoning* berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Kualitas Audit.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, Tekanan Anggaran Waktu, dan *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di bidang auditing.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengalaman kerja, kompetensi, tekanan anggaran waktu dan *moral reasoning* dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.
 - b. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan ilmu bagi auditor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik terutama pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran peneliti yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan mengenai teori yang melandasi penelitian ini yang mengacu dari buku teks, jurnal, atau artikel penelitian ilmiah lainnya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, dan metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan mengenai pengolahan data dan sampel serta hasil observasi data tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari penelitian disertai keterbatasan-keterbatasan yang didapatkan dalam penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

